

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

2.1.1.1 Pengertian Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara 2 pihak yang pertama pemilik (*principal*) dan yang kedua manajemen (*agent*). Teori agensi menyatakan bahwa apabila terdapat pemisahan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Astria, 2011).

Akan tetapi dengan berkembangnya perusahaan yang semakin besar mengakibatkan sering terjadinya konflik antara pemilik dan manajemen dalam hal ini adalah pemegang saham (*investor*) dan pihak agent yang diwakili oleh manajemen (*direksi*). Agent dikontrak melalui tugas tertentu bagi prinsipal dan mempunyai tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh prinsipal. Prinsipal mempunyai kewajiban yaitu memberi imbalan kepada agen atas jasa yang telah diberikan oleh agen.

Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen (*agent*) dan prinsipal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya konflik keagenan. Prinsipal dan agen sama-sama menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen juga sama-sama menghindari adanya risiko (Astria, 2011).

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dalam suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang bisa disebut dengan konflik keagenan atau (*agency theory*). Konflik keagenan timbul antara pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai untuk perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders* (Putra, 2012).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa teori agensi adalah teori yang timbul antara 2 pihak yaitu pemilik dengan manajemen. Kedua pihak ini mempunyai tujuan yang berbeda, pihak pemilik menginginkan laba yang sebesar-besarnya sedangkan pihak manajemen menginginkan bonus yang besar. Sehingga kedua pihak ini selalu terjadi konflik karena perbedaan tujuan tersebut.

2.1.1.2 Hubungan Keagenan

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa terdapat 3 hubungan keagenan antara lain :

- a. Antara pemegang saham (pemilik) dengan manajemen, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Hal ini dikarenakan pemegang saham menginginkan dividen maupun capital gain dari saham yang dimilikinya. Sedangkan manajer ingin dinilai kinerjanya bagus dan mendapatkan bonus, maka manajer melaporkan laba yang lebih tinggi. Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporan laba lebih konservatif.
- b. Antara manajemen dengan kreditur, manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi karena pada umumnya kreditur beranggapan bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi utang dan bunganya pada tanggal jatuh tempo.
- c. Anantara manajemen dengan pemerintah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif.

Hal ini dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, para analis sekuritas dan pihak yang berkepentingan lainnya. Pada umumnya perusahaan yang besar dibebani oleh beberapa konsekuensi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 hubungan keagenan yaitu hubungan antara pemegang saham dengan manajemen, manajemen dengan kreditur dan manajemen dengan pemerintah.

2.1.2 Integritas Laporan Keuangan

2.1.2.1 Pengertian Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk berkomunikasi antara manajemen dengan pihak luar perusahaan mengenai data keuangan atau aktivitas perusahaan selama periode tertentu (Astinia, 2013). Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya (Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Untuk menyajikan laporan keuangan semua data laporan keuangan tidak ada yang disembunyikan dan ditutupi,

guna untuk mengetahui keadaan sebenarnya perusahaan saat itu.

Integritas laporan keuangan menurut Rahiim (2013), secara terminology mempunyai arti sifat, mutu atau keadaan yang menghasilkan satu kesatuan yang utuh sehingga mempunyai potensi kejujuran dan kewibawaan.

Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana perusahaan menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan informasi yang jujur dan benar. Sedangkan menurut Hardiningsih (2010) integritas laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan yang sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang disajikan secara jujur dan apa adanya.

2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 tahun 2013, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Yang bertugas memberikan informasi adalah perusahaan kepada para pemangku kepentingan.

Sedangkan Menurut Hanafi (2000), menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya mengenai potensial perusahaan saat ini maupun yang akan datang untuk pembuatan keputusan investasi, pemberian kredit dan investasi lainnya.
- b. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemakai eksternal untuk memperkirakan jumlah waktu dan ketidakpastian dalam penerimaan kas.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, kreditur dan pemakai lainnya yang digunakan untuk memperkirakan jumlah waktu dalam penerimaan bunga dan deviden.

Berdasarkan beberapa tujuan laporan keuangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah suatu informasi yang yang berguna untuk proses pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan.

2.1.2.3 Indikator Integritas Laporan Keuangan

Integritas Laporan Keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks konservatisme. Indeks konservatisme digunakan dalam penelitian ini dengan alasan keidentikan konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang *understate* yang memiliki risiko lebih kecil dibanding dengan laporan keuangan yang *overstate*. Indeks konservatisme sebagai proksi Integritas Laporan Keuangan dihitung dengan Model Beaver dan Ryan (2000) yang digunakan juga oleh Setiawan (2016) menggunakan *market to book ratio*, yaitu:

$$\text{ILKit} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku Saham}}$$

- Keterangan :
- ILKit : Integritas Laporan Keuangan perusahaan i pada tahun t
- Harga Pasar Saham : Harga saham pada 31 Desember
- Nilai Buku Saham : Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar

2.1.3 Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam Susiana dan Herawaty, 2007).

Komite audit dibentuk oleh dewan direksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan independen atas audit ekstern dan proses laporan keuangan. Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit mempunyai peran dan tanggungjawab mengawasi audit laporan keuangan, memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku sudah terpenuhi, selanjutnya memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Astria, 2011). Sedangkan menurut Anita (2016) komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah suatu badan yang dibentuk oleh manajemen perusahaan yang mempunyai tugas untuk membantu melaksanakan tugas dan memelihara independensi akuntan.

2.1.3.2 Tujuan Komite Audit

Tujuan pembentukan komite audit yaitu (Jama'an, 2008)

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sudah sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.
- c. Menindaklanjuti dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembentukan komite audit adalah mengawasi proses internal perusahaan dan menindaklanjuti apabila terdapat penyimpangan.

2.1.3.3 Indikator Komite Audit

Komite audit ini diukur menggunakan persentase jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen dari seluruh jumlah komite audit (Nurjanah dan Pratomo, 2017).

$$KA = \frac{\sum KA_{ki}}{\sum KA} \times 100\%$$

Dimana :

KA : Komite Audit

$\sum KA_{ki}$: Jumlah komite audit yang berasal dari komisaris independen

$\sum KA$: Jumlah komite audit

2.1.4 Independensi

2.1.4.1 Pengertian Independensi

Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Audyta dan Wijayanti, 2013). Independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal di atur pada lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Nomor Kep-20/PM/2002 terdapat dalam Peraturan nomor VIII.A.2. Salah satu peraturan yang tertera dalam keputusan tersebut diantaranya membatasi hubungan antara *auditee* dan auditor dalam jangka waktu tertentu, yaitu jangka waktu kerja sama antara emiten dengan kantor akuntan harus diganti setiap lima tahun dan setiap tiga tahun untuk auditor.

Sedangkan menurut Susiana dan Herawaty (2007) independensi merupakan kebijakan yang menetapkan bahwa KAP memperoleh keyakinan yang layak bahwa para auditor, pada semua tingkatan atau ejnjang, mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Standar Profesi Akuntan Publik.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan independensi adalah sikap netral dan tidakmemihak siapapun saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

2.1.4.2 Aspek Independensi

Menurut Taylor (1997) dalam Susiana dan Herawaty (2007) ada dua aspek independensi, yaitu:

- a. Independensi sikap mental (*independence of mind/independence of mental attitude*), independensi sikap mental ditentukan oleh pikiran akuntan publik untuk bertindak dan bersikap independen.
- b. Independensi penampilan (*image projected to the public/appearance of independence*), independensi penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 aspek independensi yaitu independensi sikap mental dan independensi penampilan.

2.1.4.3 Peran Independensi

Independensi sangat berperan penting bagi profesi akuntan publik karena (Hardiningsih, 2010)

- a. Dasar bagi akuntan publik untuk melaporkan dan menyatakan pendapat dari laporan keuangan yang telah di audit dan diperiksanya. Laporan keuangan yang telah di audit dan diperiksa dapat menjadi kredibilitas dan dapat diandalkan untuk pihak yang berkepentingan.
- b. Profesi akuntan publik ini merupakan profesi yang memerlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sekali saja akuntan publik ini menurunkan independensi auditor dalam menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen maka kepercayaan masyarakat akan otomatis menurun, karena dianggap kurang menjaga independensinya.

Independensi akuntan publik ini tidak mudah untuk dipengaruhi dan akuntan publik ini harus bersikap netral dan tidak memihak siapapun. Akuntan publik ini perlu

bersikap jujur kepada pemilik perusahaan, manajemen, kreditur dan pihak yang memberikan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik tersebut.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa independensi mempunyai peran yang penting bagi profesi akuntan publik karena akuntan publik memerlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan digunakan sebagai dasar bahwa laporan keuangan tersebut sudah di audit.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

2.1.5.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ada beberapa instrumen yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya ukuran perusahaan, seperti total aset, total penjualan, nilai kapitalisasi pasar dan jumlah karyawan. Semakin besar nilai instrumen tersebut, maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi. Teori sinyal memprediksikan

aterdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan integritas laporan keuangan, karena perusahaan besar lebih andal dalam menyajikan laporan keuangan sehingga memiliki sinyal positif dimata masyarakat (Jama'an, 2008).

Perusahaan besar mempunyai sumber daya yang besar pula. Dengan adanya sumber daya yang besar itu, perusahaan mampu membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi itu menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal, jadi tidak perlu adanya tambahan biaya yang besar untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan, perusahaan yang berskala kecil dengan sumber daya yang kecil mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan yang berskala besar, sehingga untuk menyajikan informasi yang lebih luas membukakan biaya yang besar (Astina, 2013).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan.

2.1.5.2 Indikator Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan di proksi dalam Ln Total Asset perusahaan pada tiap akhir tahun pengamatan. Ukuran

perusahaan diwakili menggunakan logaritma dari aset. Logaritma natural dari total aset perusahaan dapat menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan atau aset perusahaan berarti semakin besar pula angka logaritmanya (Rahiim dan Wulandari, 2014). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur nilai ukuran perusahaan (Hermuningsih, 2012 dalam Widodo, 2016) adalah :

$$\text{SIZE}_t = \text{Ln} (\text{Total Aset } t)$$

2.1.6 Kepemilikan Manajerial

2.1.6.1 Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial yaitu saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015). Kepemilikan manajemen adalah persentase saham yang dimiliki oleh pihak internal dalam suatu perusahaan (Arif dan Bambang, 2007 dalam Wulandari dan Budiarta, 2014). Sedangkan menurut Fajaryani (2016) kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif turut dalam pengambilan keputusan perusahaan, meliputi direksi dan komisaris.

Kepemilikan manajerial juga mempunyai peran dalam membatasi perilaku menyimpang dari manajemen

perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme yang dapat dilakukan untuk meningkatkan integritas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan pemegang saham karena mereka juga bagian dari pemegang saham, dengan cara tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan keuangan (Astria, 2011).

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah berapa besar persentase kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan tersebut.

2.1.6.2 Indikator Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ini diukur menggunakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif ikut andil dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (direksi dan komisaris) dari jumlah total modal saham perusahaan yang beredar (Saputri, 2010 dalam Rahiim dan Wulandari, 2014).

$$\text{MAN} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian serta disajikan dalam tabel berikut :

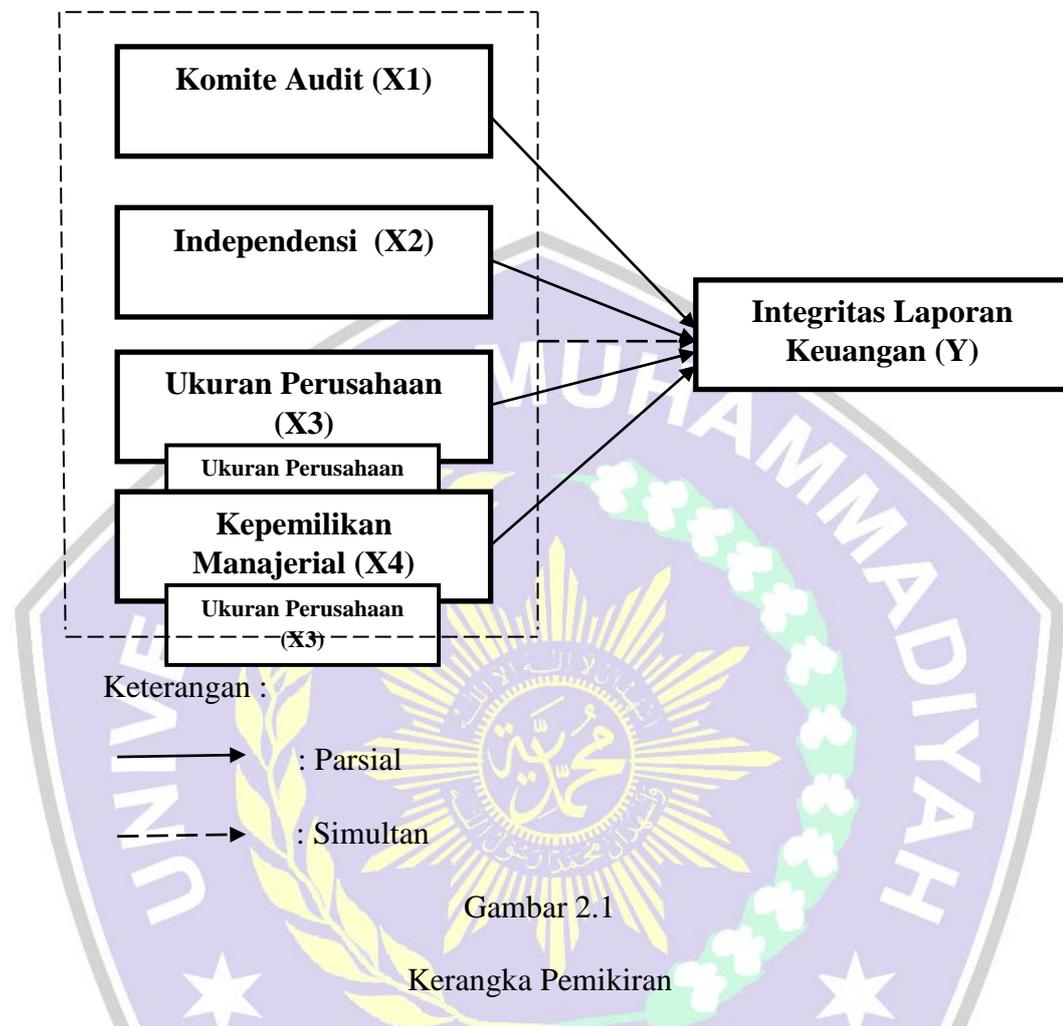
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil
1)	Hardiningsih, Pancawati (2010)	Pengaruh Independensi, <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Independensi auditor, keberadaan komite audit, keberadaan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
2)	Nurjanah, Lita dan Dudi Pratomo (2017)	Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa komite audit, komisaris independen dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.
3)	Gayatri, Ida Ayu Sri dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2013)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan <i>Leverage</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Hasil penelitian ini mendukung semua hipotesis yang diajukan dimana komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan dan memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

4)	Indrasari Anita, Willy Sri Yuliandhari dan Dedik Nur Triyanto (2016)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Berdasarkan analisis regresi data panel, menunjukkan bahwa Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh secara simultan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Secara parsial hanya variabel Komisaris Independen yang memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap Integritas Laporan Keuangan. Sedangkan Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan.
5)	Rizkita, Anggi dan Leny Suzan (2015)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan	Secara simultan kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan kualitas audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan dan secara parsial hanya ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Sumber : Dari beberapa penelitian terdahulu

2.3 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menggunakan komite audit, independensi, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen sedangkan variabel dependen Integritas Laporan Keuangan.

Terjadinya banyak kasus manipulasi laporan keuangan membuat integritas laporan keuangan tersebut diragukan. Perusahaan melakukan pengawasan atau monitoring supaya praktik manipulasi laporan keuangan tersebut bisa berkurang. Perusahaan bisa menggunakan mekanisme good corporate governance . Penerapan good corporate governance tersebut di

proksi dengan menggunakan keberadaan komite audit dan kepemilikan manajerial diduga mampu mempengaruhi praktik manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah komite audit, independensi, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan dan dapat meminimalisir praktik manipulasi laporan keuangan.

Integritas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan variabel komite audit karena keberadaan komite audit berguna untuk menjamin transparansi keadilan bagi semua pemegang saham, pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen dan keterbukaan informasi laporan keuangan, jadi keberadaan komite audit di dalam suatu perusahaan dapat digunakan sebagai salah satu cara dalam mengurangi manipulasi penyajian informasi sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Anita Indasari dkk, 2016).

Integritas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan variabel independensi karena semakin lama hubungan antara auditor dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan keuangan tersebut menjadi rendah.

Integritas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan variabel ukuran perusahaan karena perusahaan yang besar cenderung memberikan sinyal positif terhadap masyarakat. Jadi, laporan keuangan tersebut mempunyai integritas yang tinggi.

Variabel terakhir Integritas laporan keuangan dapat dilihat berdasarkan variabel kepemilikan manajerial karena adanya keikutsertaan manajemen dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, diharapkan dapat memotivasi manajemen dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan dan menselaraskan tujuan antara principal dan agent, sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

2.4 Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Komite Audit Terhadap Integritas Laporan

Keuangan

Komite audit yaitu suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan klien yang mempunyai tugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Siegel dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Dalam hal pelaporan keuangan, tanggung jawab dan peran komite audit yaitu memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, serta memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal (Astinia, 2013).

Integritas yaitu prinsip moral yang tidak memihak siapapun, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa

adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya (Mulyadi, 2004 dalam Susiana dan Herawaty, 2007). Integritas laporan keuangan menunjukkan bahwa informasi itu benar, jujur, akurat, dan bebas dari tindakan atau kegiatan yang disengaja oleh pihak manajemen dalam memanipulasi angka-angka akuntansi untuk menyesatkan pemakai laporan keuangan dalam menilai perusahaannya.

Dengan demikian komite audit dapat membantu perusahaan untuk mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan praktek manipulasi laporan keuangan yang akan mempengaruhi integritas laporan keuangan (Astria, 2011).

Hasil penelitian dari Gayatri dan Suputra (2013) menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan semakin besar proporsi komite audit maka semakin tinggi nilai integritas laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri (2015) dan Jama'an (2008). Yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah :

H₀₁ : Komite audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H_{a1} : Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.2. Pengaruh Independensi Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Independensi yaitu sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun pada saat melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen (Audyta dan Wijayanti, 2013). Penugasan audit yang terlalu lama bisa mendorong akuntan publik kehilangan independensinya, hal ini dikarenakan akuntan publik tersebut sudah merasa puas dan kurang ketatnya dalam menjalankan prosedur audit.

Dengan demikian, semakin lama hubungan antara auditor dan Kantor Akuntan dengan perusahaan akan menyebabkan independensi seorang auditor akan rendah, sehingga integritas laporan keuangan tersebut menjadi rendah.

Hasil penelitian dari Susiana dan Herawaty (2007) dan Subandono (2017) menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian adalah :

H₀₂ : Independensi tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H_{a2} : Independensi berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dengan berbagai cara, diantaranya : total aktiva, total penjualan dan nilai kapitalisasi pasar (Rizkita dan Suzan, 2015). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa banyak informasi yang terdapat di dalamnya, serta mencerminkan kesadaran dari pihak manajemen mengenai pentingnya informasi (Saksakotama, 2014).

Dengan demikian, bahwa semakin besar perusahaan akan lebih memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi.

Hasil penelitian dari Setiawan (2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan bahwa semakin besar perusahaan akan lebih memperhatikan laporan keuangannya, karena perusahaan besar mempunyai banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dihasilkan harus mempunyai integritas yang tinggi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Gayatri dan Suputra (2013) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap integritas laporan keuangan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi integritas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah :

H₀₃ : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H_{a3} : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan (Rizkita dan Suzan, 2015). Kepemilikan manajerial dapat mengurangi perilaku menyimpang dari manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah salah satu mekanisme yang dapat berperan dalam meningkatkan integritas laporan keuangan.

Dengan demikian, para manajer perusahaan yang memiliki persentase kepemilikan manajerial akan merasa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjalankan perusahaan, mengambil keputusan yang terbaik untuk kesejahteraan perusahaan, dan melaporkan laporan keuangan dengan informasi yang jujur dan benar sehingga memiliki integritas laporan keuangan yang tinggi (Astria, 2011).

Hasil penelitian dari Auditya dan Wijayanti (2013) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Kepemilikan manajerial akan menghasilkan dampak langsung terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial selalu melakukan intervensi terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, sehingga integritas laporan keuangan akan selalu berubah mengikuti keinginan pemilik manajerial.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian adalah :

H₀₄ : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

H_{a4} : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.4.5. Pengaruh Komite Audit, Independensi, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Penelitian ini akan menguji apakah semua variabel independen yaitu komite audit, independensi, ukuran perusahaan dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₀₅ : Komite Audit, Independensi, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap

integritas laporan keuangan.

H_{a5} : Komite Audit, Independensi, Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

